



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN MERIT SYSTEM DALAM MANAJEMEN
PEMERINTAHAN DI KANTOR CAMAT DAYUN
KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH

IMELDA MAISYAROH

NIM : 11770523554

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : IMELDA MAISYAROH
 NIM : 11770523554
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Penerapan Merit System Dalam Manajemen Pemerintahan Di Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak

**DISETUJUI OLEH :
 DOSEN PEMBIMBING**

Afrizal, S.Sos, M.Si
 NIP. 19690419 200701 1 025

MENGETAHUI :

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahivarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PROGRAM STUDI

Ilmu Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : IMELDA MAISYAROH
NIM : 11770523554
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI ILMU DAN SOSIAL
JUDUL : PENERAPAN MERIT SYSTEM DALAM
 MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI KANTOR
 CAMAT DAYUN KABUPATEN SIAK
TANGGAL UJIAN : 22 SEPTEMBER 2021

Disetujui Oleh
KETUA PENGUJI

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
NIP. 19640508 19930 3 2002

PENGUJI I

Weni Puji Hastuti, S. Sos, MKP
NIP. 19810505 200604 2 006

PENGUJI II

Virna Museliza, SE, M.Si
NIK. 130 712 073



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imelda Masyarah
 NIM : 11770523554
 Tempat/Tgl. Lahir : Slak, 09 Mei 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Penerapan Model Sistem Dalam Manajemen Pemerintahan
di Kantor Camat Dayun Kabupaten Slak

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 November 2021
 Yang membuat pernyataan



NIM :

11770523554

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**PENERAPAN MERIT SYSTEM DALAM MANAJEMEN
PEMERINTAHAN DI KANTOR CAMAT DAYUN
KABUPATEN SIAK**

Oleh : Imelda Maisyaroh

Penelitian dilakukan pada kantor Camat Dayun Kabupaten Siak. Latar belakang penelitian ini didasarkan keterkaitan penulis untuk melakukan penelitian terhadap Penerapan Merit Sistem dalam Manajemen Pemerintahan Di kantor Camat Dayun Kabupaten Siak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem merit dalam manajemen pemerintahan di Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak serta kendala dan upaya penyelesaiannya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini seluruhnya berjumlah 8 orang yang terdiri dari Camat Dayun, , Kasi Pem dan Pelayanan, Kasubag Kepegawaian, Kasubag Umum, Kasi PMK serta 3 orang staff. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, Penerapan Merit Sistem di Kantor Camat dayun belum terlaksana dengan baik karena terdapat beberapa kendala yaitu keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan kemampuan pengelola pegawai dan keterbatasan anggaran. Harapan kedepan agar implementasi merit sistem yang terdapat pada isi Undang-undang ASN dapat dilaksanakan di Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak professional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi pegawai.

Kata Kunci : Aparatur Sipil Negara, Manajemen, Sistem Merit.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah *robbil 'alamin*, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada seluruh umat sekalian alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menghantarkan umat dari alam kegelapan (jahiliyah) menuju alam yang terang dengan ilmu pengetahuan, semoga kita mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, *aamiin ya robbal'alamin*.

Karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Proses yang cukup panjang untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) telah penulis lalui, hingga penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Merit System Dalam Manajemen Pemerintahan Di Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak”**.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan doa serta dukungan dan saran dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Teristimewa untuk orang tua tercinta, Bapak Ponadi dan Ibu Endrawati, Bapak Katupri dan Ibu Rindayati serta Adik ku Adnan Rafif Alghifari yang menjadi kekuatan penulis selama menyelesaikan skripsi ini yang telah memberikan kasih sayang yang tak pernah padam, doa dan dukungan tanpa syarat baik moril maupun materil dan pelajaran sepanjang hidup yang mana penulis tidak akan bisa membayarnya dengan apapun. Penulis berharap suatu saat bisa membahagiakan mereka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Teruntuk keluarga kedua, Bunda Sufaeni dan Pakde Wagiman, Mbah Tabar, Sepupu Mbak Siti Rohmawati, serta semua keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan bagi penulis hingga sampai di titik ini.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat rektorat lainnya.
4. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Khairunsyah Purba S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Mashuri, S.Ag, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA selaku dosen penasehat akademis selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak arahan, masukan serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terutama Bapak dan Ibu Dosen Prodi Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu kepada penulis dari semester awal hingga semester akhir, serta kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seluruh staf Tata Usaha atas segala bantuan selama proses pembuatan berjalan hingga sampai akhirnya selesai.

10. Bapak Novendra Kasmara, S.STP, M.Si selaku Camat Dayun dan seluruh Pegawai Kantor Camat Dayun tanpa terkecuali yang telah memberikan izin serta memberikan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian di lokasi penelitian ini.

11. Teman seperjuangan penulis yang selalu ada disaat suka maupun duka semasa kuliah, Indah Wulan Anggini, Nihaya Almutimah, Asmadianti, Elpita Wahyuni, Anisa Afriyani, Yola Melinda, Anisa Aulia dan Dwi Yuniar Andini.

12. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa angkatan 2017 Prodi Administrasi Negara terkhusus lokal A, kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2020 Kampung Pangkalan Makmur.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa dan dukungan hingga dapat terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sebab dalam kajian ilmiah ini terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari segi tulisan maupun referensi yang diperlukan serta analisis dan interpretasi yang diberikan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan penulisan lainnya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu dalam proses



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

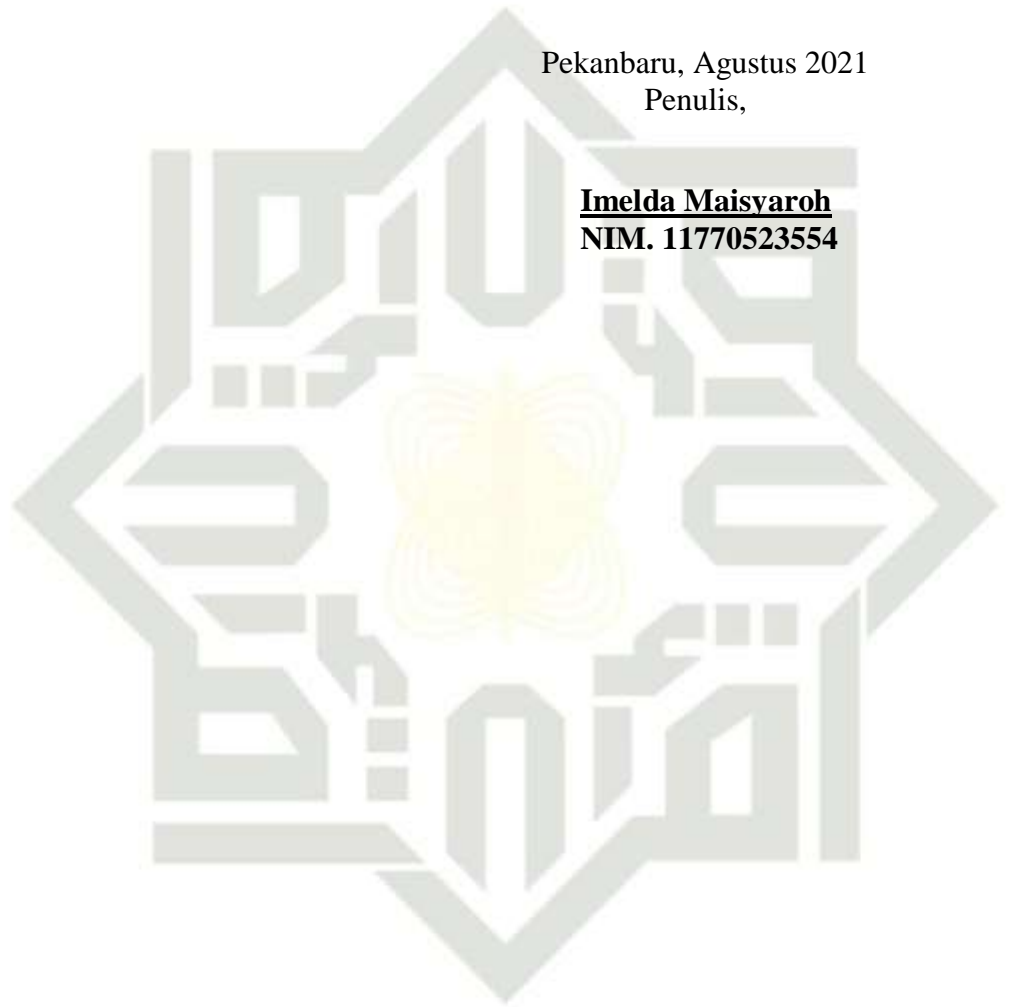
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian skripsi ini dapat diterima disisi Allah SWT, *aamiin* ya *robbal'alam*.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, Agustus 2021
Penulis,

Imelda Maisyaroh
NIM. 11770523554



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Batasan Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Aparatur Sipil Negara.....	14
2.2 Sistem Merit.....	17
2.3 Kriteria Sistem Merit.....	23
2.4 Manajemen Pemerintahan.....	23
2.5 Manajemen Aparatur Sipil Negara.....	27
2.6 Pandangan Islam Tentang merit System.....	30
2.7 Penelitian Terdahulu.....	34
2.8 Definisi Konsep.....	37
2.9 Konsep Operasional.....	38
2.10 Kerangka Pemikiran.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	42
3.4 Informan Penelitian.....	43
3.5 Teknik Analisa Data.....	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Kantor Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.....	47
4.2 Visi dan Misi Kantor Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.....	48
4.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	49
4.4 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.....	60

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Penerapan Merit System di Kantor Camat Dayun.....	62
5.1.1 Proses Seleksi.....	63
5.1.2 Penghargaan dan Sanksi Berbasis Kinerja.....	67
5.1.3 Peningkatan Evaluasi Kerja.....	69
5.1.4 Manajemen Karir.....	71
5.1.5 Promosi dan Mutasi.....	76
5.2 Kendala dalam Penerapan Merit System dan Upaya Mengatasinya.....	80

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	84
6.2 Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keadaan Pegawai Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak	6
Tabel 1.2 Jabatan Administrasi Menurut Tingkat Pendidikan	6
Tabel 1.3 Tabel Mutasi dan Promosi Pegawai Kantor Camat Dayun.....	7
Tabel 1.4 Daftar Pangkat Jabatan Administrasi Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak.....	8
Tabel 2.1 Konsep Operasional.....	39
Tabel 3.1 Informan Penelitian Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak.....	44

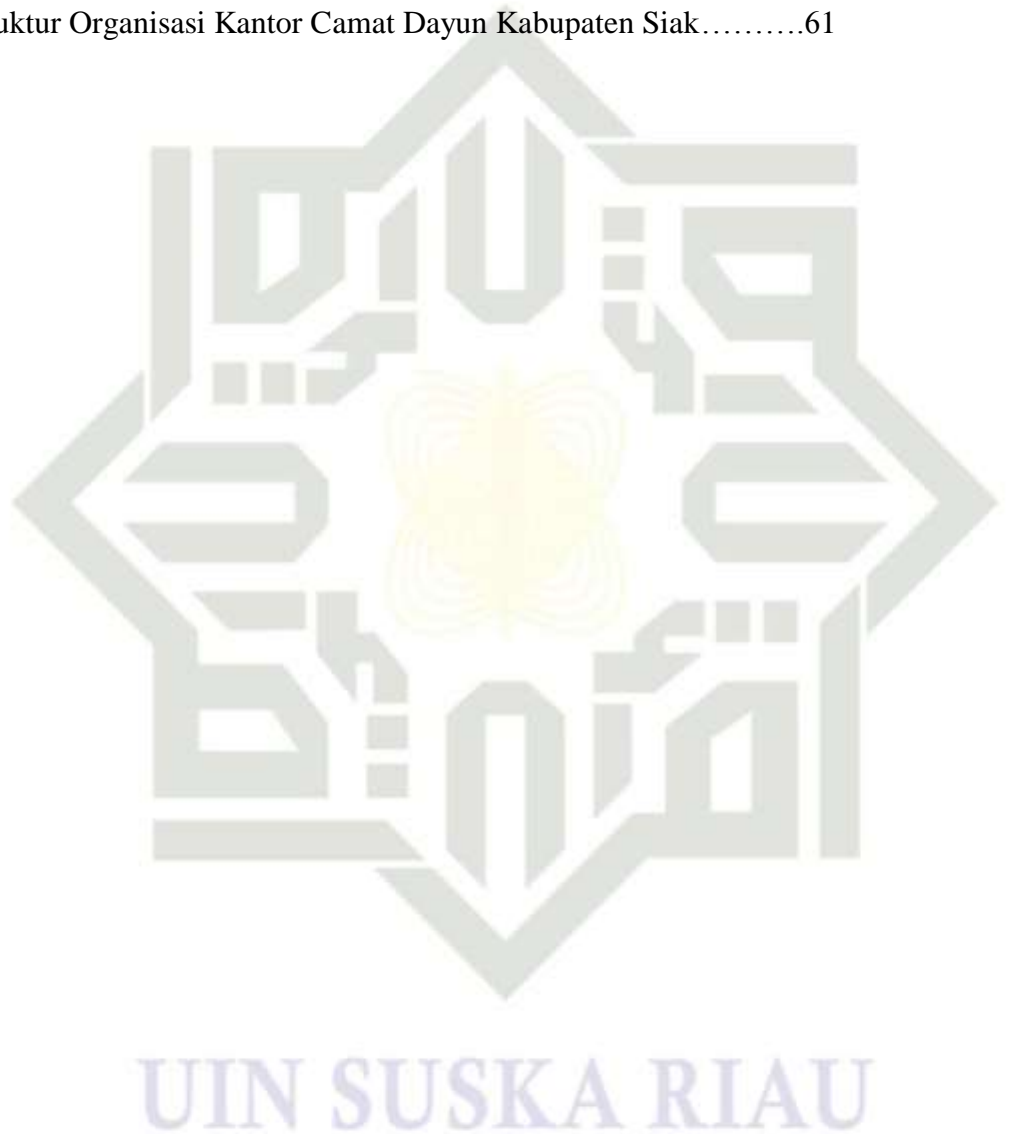


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	45
Gambar 4.1 Stuktur Organisasi Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak.....	61





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum dimana setiap penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan kepada hukum. Keberadaan hukum bagi negara diharuskan menjunjung nilai-nilai atau asas-asas yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukumnya. Pada era reformasi ini, upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berwibawa telah menjadi prioritas utama bagi rakyat dan pemerintahan Indonesia. Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia terdapat berbagai macam permasalahan yang terjadi.

Bentuk permasalahannya berupa pola pikir pemerintah dalam struktur pemerintah, di mana titik berat kekuasaan berada pada tangan penguasa birokrasi pemerintah yang mengakibatkan rakyat sebagai unsur utama demokrasi tidak mempunyai peran yang dapat mengawasi birokrasi pemerintah secara maksimal. Selain itu masih banyak permasalahan yang timbul, antara lain tidak adanya daya saing Pegawai Negeri Sipil dalam menghadapi globalisasi, kurangnya fungsi pelayanan terhadap masyarakat, dan terutama tidak jelasnya visi, misi, dan tujuan yang dimiliki oleh masing-masing organisasi baik di tingkat departemen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai kebijakan manajemennya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pemerintahan telah terjadi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perwujudan tata pemerintahan yang demokratis dan baik. Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian adalah penataan aparatur pemerintah yang meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem, dan penataan manajemen sumber daya pegawai. Dalam membentuk penyelenggara negara yang memiliki integritas tinggi perlu adanya hukum dibidang kepegawaian yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya hukum kepegawaian ini dapat melancarkan hubungan antara penguasa negara dengan rakyatnya, dimana Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu faktor yang mendukung adanya kelancaran proses penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yang merupakan cita-cita bangsa. Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pegawai Aparatur Sipil Negara disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi untuk pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan tugas tugas pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat

Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN merupakan amanat utama dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Tujuan diterapkannya Sistem Merit adalah untuk memastikan jabatan pegawai yang ada di birokrasi pemerintah memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Dengan kata lain, Sistem Merit bertujuan untuk membangun bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan mewujudkan pegawai ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi. Dengan menerapkan sistem merit maka pengangkatan pegawai, mutasi, promosi, penggajian, penghargaan dan pengembangan karier pegawai didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai. Sistem tersebut tidak hanya menimbulkan rasa keadilan di kalangan pegawai, juga dapat mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja.

Sistem merit atau “*merit system*” di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dilaksanakan agar kinerja birokrasi dapat meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya lebih ke professional dan lebih netral karena menghapuskan faktor kedekatan, yang artinya tidak merekrut dalam peningkatan karier atau jabatan aparatur karena ada pertalian saudara, teman dekat atau money politik, tetapi sesuai dengan keahliannya direkrut dengan cara-cara yang professional berdasarkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompetensi individu yakni independen, netralitas, produktif, integritas, pelayanan prima, pengawasan dan akuntabilitas. Tujuan Sistem Merit adalah menciptakan kompetensi sumber daya manusia yang professional dan produktifitas yang berkaitan pada manajemen Aparatur Sipil Negara, yang menata dengan baik dari rekrutmen pegawai, Pengembangan Pegawai, dan Penempatan dalam Job Promosi yang disesuaikan dengan sistem merit berbasis Kompetensi.

Selain Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat pula Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang memuat mengenai manajemen karier pada instansi pemerintah dan disebutkan pada Pasal 162 dan Pasal 163 dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil. Manajemen itu sendiri merupakan perkembangan dari pengertian administrasi yang berarti pemberian jasa atau bantuan. Manajemen dan administrasi sangat berhubungan karena manajemen merupakan inti dari administrasi. Sistem merit manajemen Aparatur Sipil Negara merupakan pendekatan yang menekankan pada pengelolaan Aparatur Sipil Negara dengan mendasarkan kesesuaian antara keahlian pegawai dengan kualifikasi jabatannya. Penerapan sistem merit bertujuan untuk memastikan jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Artinya, pengangkatan pegawai, mutasi, promosi, penggajian, penghargaan dan pengembangan karier pegawai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai. Sistem tersebut tidak hanya menimbulkan rasa keadilan di kalangan pegawai, juga dapat mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja

Berdasarkan pengamatan peneliti di kantor Camat Dayun, terlihat fenomena maupun gejala, yaitu masih adanya aparatur yang tingkat pendidikannya masih rendah sehingga mempengaruhi kualitas pekerjaan yang dilakukan. Masih banyak terjadi tindakan-tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh aparatur tersebut, salah satunya yaitu nepotisme. Kejadian ini sangat disayangkan mengingat belum tentu orang yang menempati suatu jabatan tertentu tersebut memiliki kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dibutuhkan pada jabatan tersebut. Nepotisme juga memicu kecemburuan sosial antar aparatur karena merasa diperlakukan tidak adil dalam proses promosi jabatan yang tidak sesuai dengan tingkatan karier. Untuk menjalankan roda Pemerintahan Kecamatan Dayun sangat dibutuhkan pegawai yang bekerja sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Siak, adapun keadaan pegawai Kecamatan Dayun sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Keadaan Pegawai Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak

NO	Keadaan Pegawai	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Pegawai negeri	17	4	21
2	Pegawai honorer	11	2	13
3	Satpol pamong praja	5	-	5
	Jumlah	33	6	39

(sumber: Paten kab.siak kantor Camat Dayun)

Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah keseluruhan pegawai kantor Camat Dayun berjumlah 39 orang, dimana sebanyak 21 orang pegawai adalah pegawai negeri, 13 orang adalah pegawai honorer dan 5 orang adalah satpol pamong praja.

Tabel 1.2
Jabatan Administrasi Menurut Tingkat Pendidikan

No	Jenis pendidikan	Jumlah
1	SD	2
2	SMP	2
3	SLTA/SMA	22
4	Perguruan Tinggi (S-1)	11
5	Perguruan tinggi (S-2)	2
	Jumlah	39

(sumber: Paten kab.siak kantor Camat Dayun)



Pada tabel di atas dilihat dari jumlah tingkat pendidikan pegawai pada jabatan administrasi pada kantor camat Dayun terdiri dari SD,SMP,SMA dan Perguruan Tinggi (S1 dan S2). Selanjutnya untuk melihat mutasi dan promosi di kantor camat dayun, dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 1.3

Tabel Mutasi dan Promosi Pegawai Kantor Camat Dayun

No	Tahun	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	2019	Eko Sunarji	Pelaksana Kantor Camat Mandau	Pelaksana kantor Camat Dayun
2	2020	Novendra Kasmara, S.STP, M.Si	Camat Sungai Mandau	Camat Dayun
3	2020	Yufrinur, S.Sos	Kabid Satpol PP	Sekcam Dayun
4	2020	Asmudin, S.Pd, SD	Kasi Kelurahan Minas Jaya	Kasi Pem Dayun
5	2020	Ricko Riyanto, S.STP, M.Si	Camat Dayun	Ajudan Gubernur Prov.Riau
6	2020	Rizannaky Kadri, S.IP, M.Si	Sekcam Dayun	Kabid Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Siak
7	2020	Sundariyanto, SH	Kasi Pem Dayun	Kasi Dinas transmigrasi dan tenaga kerja Kab.Siak

Sumber : Kantor Camat Dayun

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah mutasi dari tahun 2019-2020 sebanyak 7 orang pegawai dimana mutasi terbanyak pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 belum ada mutasi pegawai. Selanjutnya untuk melihat pangkat dan golongan dapat dilihat table berikut ini :

Tabel 1.4
Daftar Pangkat Jabatan Administrasi Kantor Camat Dayun
Februari 2020 - September 2021

No	Jenis dan Golongan	Jumlah
1	IV/a	3
2	III/d	2
3	III/c	1
4	III/b	3
5	II/d	8
6	II/c	2
7	II/b	1
8	I/b	1
	Jumlah	21

Sumber: Paten kab.siak kantor Camat Dayun

Pada table di atas dapat dilihat jumlah golongan/pangkat pada pegawai di kantor Camat Dayun Kabupaten Siak yang berjumlah 21 orang terdiri dari golongan IV/a, III/d, III/c, III/b, II/d, II/c, II/b, I/b.



Visi Kantor Camat Dayun :

“ Terwujudnya kecamatan Dayun sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat yang tertib, taat dan terpadu dalam mensukseskan program pemerintah kabupaten daerah Siak”

Misi Kantor Camat Dayun :

1. Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib, taat dan patuh terhadap peraturan pemerintah
4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas bagi aparatur kecamatan
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, mudah, murah, cepat dan transparan

Agar tercapainya visi dan misi Kantor Camat Dayun tersebut diperlukan kerjasama dari berbagai pihak terutama dari pihak pemerintah kecamatan itu sendiri, antara lain dengan menerapkan sistem merit dalam segala aspek. Namun kenyataan yang terlihat penempatan sebagian besar pegawai kurang di dasarkan pada Sistem Merit . Hal ini terlihat dari :

1. Kurang diperhatikannya hasil pendidikan dan latihan perjenjangan dalam penempatan tersebut
2. Faktor pengalaman kerja kurang juga mendapat perhatian dalam penempatan pejabat/pegawai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor penguasaan terhadap pekerjaan kurang diperhatikan dalam penempatan pejabat/pegawai .

Atas dasar latar belakang tersebut, Penulis melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Pemerintahan di Kantor Camat Dayun”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Pemerintahan Di Kantor Camat Dayun ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kecamatan dayun dalam menerapkan Sistem Merit dalam manajemen Pemerintahannya dan bagaimana upaya mengatasinya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem merit dalam manajemen pemerintahan di Kantor Camat Dayun.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan Dayun dalam penerapan sistem merit dalam manajemen pemerintahan di kantor Camat Dayun dan upaya mengatasinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi peneliti, untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang Merit Sistem dalam Manajemen Pemerintahan di Kantor Camat Dayun, Kabupaten Siak
2. Bagi objek yang diteliti, Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan bagi Pemerintah Kecamatan Dayun dalam penerapan Merit Sistem. Selain itu, diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi secara umum mengenai Merit Sistem.
3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan tambahan referensi dalam melakukan penelitian tentang penerapan Merit sistem dalam manajemen pemerintahan di Kantor Camat Dayun.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penulisan ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya maka dikemukakan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Pada analisis ini peneliti memfokuskan pada penerapan Merit Sistem
2. Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Dayun, Kabupaten Siak

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih sistematis dan terarah, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab I ini sebagai pendahuluan dimana peneliti menguraikan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada Bab II ini peneliti mengemukakan landasan teori yang berhubungan dengan judul penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini peneliti akan mengemukakan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, subjek penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada Bab IV ini menjelaskan kondisi Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak menyangkut sejarah berdirinya, gambaran umum wilayah, struktur organisasi dan aktivitas kantor

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab V ini peneliti menjelaskan hasil pengelolaan data di lapangan, hasil penelitian di lapangan serta wawancara tentang Penerapan Merit System dalam Manajemen Pemerintahan di Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak.

BAB VI

PENUTUP

Pada Bab VI ini merupakan penutup, dimana pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berguna bagi instansi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Aparatur Sipil Negara

Sebelum membahas mengenai sistem merit dalam manajemen pemerintahan, diperlukan pemahaman terlebih dahulu mengenai Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal tersebut dilakukan guna mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia

“Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Pegawai Aparatur Sipil Negara berkedudukan sebagai unsur aparat negara dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah serta harus terbebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan Aparatur Sipil Negara, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai :

- a. Pelaksana kebijakan publik
- b. Pelayanan publik
- c. Perekat dan pemersatu bangsa

Pegawai aparatur sipil Negara bertugas :

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara republik Indonesia

Pegawai Aparatur Sipil Negara juga berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Aparatur Sipil Negara juga memiliki beberapa fungsi jabatan,

diantaranya:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jabatan Administrasi

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Setiap jabatan administrasi ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jabatan administrasi terdiri atas:

- a. Jabatan administrator, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
- b. Jabatan pengawas, bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana
- c. Jabatan pelaksanan, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

2. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

- a. Jabatan fungsional keahlian, terdiri dari 4 (empat) tingkatan yakni ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama
- b. Jabatan fungsional keterampilan, terdiri dari 4 (empat) tingkatan yakni penyelia, mahir, terampil dan pemula



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan pimpinan tinggi terdiri atas:

- a. Jabatan pimpinan tinggi utama
- b. Jabatan pimpinan tinggi madya
- c. Jabatan pimpinan tinggi pratama

Jabatan pimpinan tinggi berfungsi untuk memimpin dan memotivasi setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah melalui :

- a. Kepeloporan dalam bidang :
 1. Keahlian professional
 2. Analisis dan rekomendasi kebijakan
 3. Kepemimpinan manajemen
- b. Pengembangan kerjasama dalam instansi lain
- c. Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara

Untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan.

2.2 Sistem Merit

Kata *merit* berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti jasa, manfaat dan prestasi atau dapat diartikan juga hal-hal yang patut dihargai. Sedangkan sistem dapat diartikan sebagai gabungan dari beberapa faktor yang terkait satu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama lain, jika salah satu faktor berubah akan mempengaruhi perubahan pada faktor terkait lainnya. Sehingga secara sederhana konsep dari sistem merit ini merupakan sistem pembayaran yang mengkaitkan imbalan dengan prestasi kerja. “Sistem merit merupakan sistem penggajian yang rasional dan berorientasi pada penciptaan adanya rasa keadilan sehingga penghasilan yang diberikan akan dikaitkan dengan kinerja secara individu. Sistem merit menurut konsepsi disiplin ilmu merupakan suatu sistem manajemen kepegawaian yang menekankan pertimbangan dasar kompetensi bagi calon yang akan diangkat, ditempatkan, dipromosi, dan dipensiun sesuai Undang-Undang berlaku.

Sistem Merit merupakan sistem yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Di dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 juga mengartikan bahwa : “Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.” yang artinya sistem merit adalah pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan kompetensi melalui prestasi.

(Jaluanto, 2020)Sistem ini berdasarkan atas jasa kecakapan seseorang pegawai dalam usaha mengangkat dan mendudukan pada jabatan tertentu. Sistem ini lebih bersifat objektif, karena dasar pertimbangan kecakapan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinilai secara objektif dari pegawai yang bersangkutan. Karena dasar pertimbangan seperti ini yang berlandaskan pada jasa kecakapan. Penilaian objektif tersebut, pada umumnya ukuran yang dipergunakan ialah ijazah pendidikan (Agus, 2016), sedangkan sistem merit menurut Miftha Thoha (2014) sistem yang menekankan pada kompetensi dan profesionalitas calon yang direncanakan menduduki jabatan yang sama atau selaras dengan kompetensi jabatannya. Selain itu, moralitas dari calon juga menjadi pertimbangan dalam proses pengangkatan dan promosi.

Sistem merit atau “*merit system*” di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dilaksanakan agar kinerja birokrasi dapat meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya lebih ke professional dan lebih netral karena menghapuskan faktor kedekatan, yang artinya tidak merekrut dalam peningkatan karier atau jabatan aparatur karena ada pertalian saudara, teman dekat atau money politik, tetapi sesuai dengan keahliannya direkrut dengan cara-cara yang professional berdasarkan kompetensi individu yakni independen, netralitas, produktif, integritas, pelayanan prima, pengawasan dan akuntabilitas. Tujuan Sistem Merit adalah menciptakan kompetensi sumber daya manusia yang professional dan produktifitas yang berkaitan pada manajemen Aparatur Sipil Negara, yang menata dengan baik dari rekrutmen pegawai, Pengembangan Pegawai, dan Penempatan dalam Job Promosi yang disesuaikan dengan sistem merit berbasis Kompetensi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mendapatkan pemimpin aparatur dan aparatur yang kompeten serta berintegritas tersebut, harus sesuai dengan prinsip-prinsip system merit. Prinsip-prinsip sistem merit menurut Santa Monica College dalam Titin Ellyana (2011:22), yaitu:

1. Melakukan rekrutmen seleksi dan prioritas berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil
2. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi
3. Mempertahankan atau memisahkan pegawai aparatur sipil Negara berdasarkan kinerja yang dihasilkan
4. Pelatihan pegawai sesuai dengan yang diperlukan untuk kualitas kerja
5. Menjamin perlakuan yang adil terhadap pelamar dan pegawai dalam semua aspek administrasi personalia tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, asal-usul kebangsaan, usia, orientasi seksual, atau status perkawinan, serta nepotisme.
6. Melindungi pegawai aparatur sipil Negara terhadap pemaksaan politik dan melarang penggunaan jabatan untuk mempengaruhi pemilihan untuk kantor.
7. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai aparatur sipil Negara
8. Mengelola pegawai aparatur sipil Negara secara efektif dan efisien



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan prinsip dasar sistem merit sebagaimana dimaksud Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, maka diperlukan konsistensi Pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut melalui reformasi birokrasi secara komprehensif. Mengingat, reformasi birokrasi merupakan konsep yang luas ruang lingkupnya, mencakup pembenahan struktural (kelembagaan) dan kultural, prosedural, dan etika birokrasi yang sangat *complicate*, di mana Pemerintah telah memiliki norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat enam yang harus dicermati dalam sistem merit yaitu :

1. Tentang pengorganisasian perencanaan Aparatur Sipil Negara didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, audit kepegawaian penyesuaian arah kebijakan nasional
2. Perekrutan berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan (diversifikasi tes) & sertifikasi, TKD & TKB sistem komputerisasi, orientasi & *engagement* untuk setiap penugasan pada jabatan baru.
3. Pengembangan kapasitas dalam mengurangi kesenjangan kompetensi dengan cara pelatihan 20 jam per tahun untuk setiap PNS, *Training Need Analysis (TNA)*, Diklat, *Coaching & Mentoring* berbasis kinerja.
4. Penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk Tim Penilai Kinerja, *Performance dialogue* dan *Merit & performance based incentives*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Promosi dan rotasi menuju Pegawai Negeri Sipil yang dinamis dengan cara *talent mapping*, *succession & career planning* dan rotasi nasional sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Open recruitment* adalah salah satu cara sebelum mendapatkan calon terbaik di organisasi (*talent management*). *Talent mapping* perlu dibentuk melalui *assessment center* yang distandardisasi oleh BKN, sehingga setiap organisasi perlu membentuk asesor internal untuk mendapatkan talent terbaik
6. Pengapresiasi secara layak dengan perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi yang memadai. Pemerintah saat ini akan mengubah sistem pensiun, yaitu Pegawai Negeri Sipil berkontribusi melalui iuran pasti sehingga tidak terlalu membebani anggaran Negara

Sistem merit harus diterapkan pada semua komponen atau fungsi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Semua fungsi dan komponen dalam manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 (mengatur tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil) dan Pasal 93 (mengatur manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara harus menerapkan sistem merit. Demi tercapainya prinsip merit ini, perlu adanya penetapan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang mempunyai kewajiban mengembangkan dan mengelola serta bertanggung jawab terhadap kinerjanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Kriteria Sistem Merit

Menurut Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, pasal 134 ayat (2) Sistem Merit meliputi kriteria:

- a. Seluruh Jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan
- b. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja
- c. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka
- d. Memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta
- e. Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan
- f. Menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN
- g. Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja
- h. Memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang
- i. Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN

2.4 Manajemen Pemerintahan

Istilah Manajemen pemerintahan dipakai sebagai terjemahan dari *Management of Government* dimana lebih memfokuskan pada teori, fungsi dan konsep manajemen di bidang pemerintahan. Manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan "tata kelola" atau pengelolaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan”.

Manajemen pemerintahan juga berperan dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah “bagaimana menciptakan effectiveness usaha (“*doing right things*”) secara efficient (“*doing things right*”) dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.” Manajemen pemerintahan adalah bagian utama dari bidang kajian Administrasi Negara yang sangat luas. Manajemen pemerintahan berkaitan dengan fungsi – fungsi dan proses manajemen pada bagian di semua tingkatan pemerintahan sebagai sektor nirlaba.

Pada prinsipnya tugas pokok pemerintah adalah *public service*, yaitu pelayanan atau melayani masyarakat. Tingkat kemampuan pemerintah dengan tingkat kemampuan masyarakat moderen, tradisional maupun termodern sekalipun harus seimbang atau diimbangi. Disamping itu pemerintah dituntut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih banyak memberikan bimbingan, pembinaan serta motivasi mengejar ketertinggalan dari bagian masyarakat yang lain yang sudah maju, sehingga wajar apabila dalam kondisi seperti ini dibutuhkan *government* (pemerintah) dan *governance* (pemerintahan) yang memadai.

Fungsi manajemen pemerintahan dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut:

1. Manajemen pemerintahan berarti membuat keputusan-keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi tentang tata kelola pemerintahan, baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Manajemen pemerintahan berarti membuat kebijakan-kebijakan tentang hubungan yang mengikat antara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan penguasa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan kekuasaan pemerintahan, baik sebagai pimpinan negara, pemerintahan, maupun lembaga-lembaga tinggi negara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan pertanggung jawaban penggunaan anggaran secara berkala.
7. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) setiap akhir tahun anggaran.
8. Melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang ditugaskan.
9. Menentukan standar pelayanan yang wajib dilaksanakan di bidang tata kelola pemerintahan.
10. Menetapkan kinerja penentuan dan perubahan tata kelola pemerintahan.
11. Menyusun rencana nasional secara makro bidang tata kelola pemerintahan.
12. Menetapkan persyaratan jabatan bagi calon yang menempati jabatan di bidang pemerintahan.
13. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi kelembagaan, pemberian pedoman/bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervise bidang tata kelola pemerintahan.
14. Pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara bidang tata kelola pemerintahan.
15. Penetapan standar pemberian izin untuk investor yang akan menanamkan modalnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Pengaturan sistem kelembagaan perekonomian negara.
17. Penyelesaian perselisihan antar provinsi dibidang administrasi atau perbatasan daerah.
18. Penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan pengendalian bidang tata kelola pemerintahan.
19. Penyelenggaraan hubungan kerja dibidang tata kelola pemerintahan antar instansi.

2.5 Manajemen Aparatur Sipil Negara

Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah pengelolaan Aparatur Sipil Negara untuk menghasilkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen Aparatur Sipil Negara diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Pengaturan mengenai manajemen Aparatur Sipil Negara terdapat dalam Bab VIII Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen Aparatur Sipil Negara lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman.

Berdasarkan Pasal 52 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Sipil, manajemen aparatur sipil Negara meliputi Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK).

1. Manajemen PNS terdiri dari :
 - a. Penyusunan dan penetapan kebutuhan
 - b. Pengadaan
 - c. Pangkat dan jabatan
 - d. Pengembangan karier
 - e. Pola karie
 - f. Promosi
 - g. Mutasi
 - h. Penilaian kinerja
 - i. Penggajian dan tunjangan
 - j. Penghargaan
 - k. Disipin
 - l. Pemberhentian
 - m. Jaminan pension dan jaminan hari tua
 - n. Perlindungan

Manajemen pegawai negeri sipil diarahkan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna dan untuk mewujudkannya diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum. Kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah dijelaskan, berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

2. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja terdiri dari :
 - a. Penetapan kebutuhan
 - b. Pengadaan
 - c. Penilaian kinerja
 - d. Penggajian dan tunjangan
 - e. Pengembangan kompetensi
 - f. Pemberian penghargaan
 - g. Disiplin
 - h. Pemutusan hubungan kerja
 - i. Perlindungan

Bagian-bagian dari manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja diatas diatur dalam pasal 56 sampai dengan pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.



2.6 Pandangan Islam tentang Merit System

Bagaimana cara memperoleh tenaga kerja atau karyawan dalam sejarah awal Islam, berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari yang berkata:

قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ نَبِيِّ عَمِّي فَقَالَ
أَخَذَ الرَّجُلَيْنِ يَارَسُولَ اللَّهِ أَمْرًا عَلَيَّ بَعْضُ مَا وَالْأَكْ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ
ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ وَاللَّهِ لَا أَتَوَلَّى عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سِوَا لِي وَلَا أَخَذَ أَحَدًا مِنْ غَيْرِهِ (الجامع الصحيح)

Artinya: “Aku dan dua orang lelaki dari keturunan pamanku datang kepada Nabi Muhammad saw, salah satu dari lelaki itu berkata, “Hai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai pejabat atas kekuasaan yang telah diberikan Allah kepadamu”, lelaki lainnya juga mengatakan demikian. Kemudian Rasulullah saw bersabda: “Demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang memintanya atau orang yang menginginkannya”. (Hadist shohih Muslim)

Hadits lainnya dari HR Muslim yang berkaitan dengan topik diatas adalah ketika Abu Dzar Al-Ghifari meminta Rasulullah untuk menjadikannya sebagai gubernur pada salah satu wilayah kekuasaan Islam, Rasulullah menanggapi permintaan ini dengan berkata:

قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَنْتَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ الْأَمْنُ
أَخَذَهَا بِخَفِّهَا وَادِّي الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

Artinya: “Hai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah dan aku suka sesuatu yang ada pada dirimu sebagaimana dalam diriku. Sesungguhnya jabatan itu amanah, dan dihari kiamat, ia akan berubah menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali diserahkan pada orang yang berhak dan mampu menunaikan tugas-tugas yang terkait dengan jabatan itu”

Rasulullah saw menolak permintaan Abu Dzar karena dalam jabatan ini terdapat persyaratan kompetensi yang tidak terpenuhi olehnya. Dua hadits



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatas memperlihatkan bagaimana Rasulullah saw memilih, yang pertama beliau tidak memberikan jabatan kepada yang sangat menginginkannya dan hadits yang kedua beliau mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah.

Dari sisi yang berbeda dapat diartikan bahwa dalam kasus dua hadits ini, mereka yang meminta jabatan tersebut tidak mengukur kemampuannya dirinya sendiri. Rekrutmen adalah dimana proses menemukan dan menarik pelamar-pelamar yang mampu untuk dipekerjakan. Proses ini dimulai ketika calon pelamar dicari dan berakhir dengan sejumlah lamaran masuk. Peran rekrutmen adalah menemukan sejumlah pelamar baru yang segera dapat bekerja ketika organisasi ataupun perusahaan memerlukannya.

Jadi, hasil dari proses rekrutmen adalah kumpulan pelamar yang telah memenuhi syarat sehingga siap untuk disaring. Proses menyaring melibatkan sepasang kegiatan yang umum dikenal dengan rekrutmen dan seleksi. Dalam aktifitas perekrutan sumber daya islami harus ada acuan pada criteria kejujuran (Shiddiq), dapat dipercaya (Amanah), cerdas (Fathanah) dan mampu berkomunikasi dengan baik (Thabligh). Empat kriteria ini sangat relevan dalam upaya mendapatkan karyawan yang berkualitas dan ini harus ditemukan sejak awal dalam proses perekrutan. Rekrutmen karyawan dalam perusahaan atau organisasi merupakan tahapan awal dalam manajemen personalia setelah pelaksanaan seleksi dan penempatan kerja. Pengertian tersebut dapat dipahami dalam firman Allah SWT:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapak kuambil lah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”*. (QS. Al-Qashash: 26)

Dalam usaha mencari tenaga kerja, Al-Qur'an memberikan penjelasan bahwa seseorang untuk mendapat kerja adalah didasarkan kepada keahlian serta kompetensi yang dimiliki. Disamping juga harus memiliki sifat jujur dan amanah, dalam ayat tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa para pekerja yang layak untuk direkrut adalah mereka yang memiliki kekuatan, baik kekuatan fisik maupun non fisik tergantung jenis pekerjaan sekaligus memiliki sifat amanah atau terpercaya.

Al Qowi (Kuat) dalam pengertian diatas dapat diartikan dengan keterampilan atau kualifikasi tertentu yang disyaratkan oleh jabatan bersangkutan serta kemampuan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam. Selain itu dapat diartikan juga sebagai kuat pengetahuannya tentang ilmu yang sesuai dengan jenis pekerjaan, disiplin, cakap. Dan kejujuran akan menyempurnakan kualitas teknik yang dimiliki oleh calon karyawan. Karena tanpa kejujuran banyak orang pintar yang justru membawa petaka bagi perusahaan. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa dalam memilih calon karyawan haruslah berdasarkan kepatutan dan kelayakan. Al Amin (Dapat dipercaya) berarti takut pada Allah SWT, mentaati kewajiban moral dan komitmen pada tujuan-tujuan organisasi serta masyarakat. Islam menyumbang pada pengembangan etos kerja yang positif dalam bidang jasa publik melalui dorongan kepada umatnya untuk bekerja keras. Satu hal yang tidak boleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilupakan adalah konsep adil yang harus dipertimbangkan dalam merekrut karyawan. Adil dalam rekrutmen berarti memberi peluang yang sama bagi setiap orang dan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap pelamar. Jabatan diberikan kepada yang lebih berhak dan lebih kompeten. Bukan karena faktor kekerabatan diantara keduanya, karena hubungan persabahatan (Mawali) atau pertemanan karena kesamaan negeri atau madzab, tarikat atau suku. Dalam Islam, prosesi perekrutan pegawai juga harus berdasarkan pada kepatutan dan kelayakan calon pegawai atas pekerjaan yang akandijalani. Ketika pemilihan perekrutan jatuh kepada orang yang sedikit memiliki kemampuan, padahal masih banyak terdapat yang lebih patut dan lebih baik (dari golongan orang-orang terdahulu) maka proses perekrutan ini bertentangan dengan syariat Islam. Dijelaskan dalam Alquran bahwa:

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتْرَكُ بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِتَفْعِيلِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَتِيمُ لَدَيْنَا مَكِينٌ أُمِينٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ أَجْعَلْنِي

عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya: "Dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaKu, agar aku memilih Dia sebagai orang yang rapat kepadaku". Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan Dia, Dia berkata: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan Tinggi lagi dipercayai pada sisi kami". Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (QS. Yusuf: 54-55)

Dalam ayat diatas bahwa Nabi Yusuf AS memilih jabatan yang menurutnya sanggup dipegangnya setelah beliau mendapat kepercayaan dari raja dan Nabi Yusuf AS juga sangat tahu kemampuannya dan beliau inginmembagi kemampuannya tersebut untuk kepentingan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadaan tenaga kerja adalah serangkaian yang mengawali kegiatan operasional manajemen sumber daya insani. Dalam manajemen sumber daya insani, pengadaan tenaga kerja adalah tidak lain dari tiga jenis kegiatan yang dikenal dengan rekrutmen, selection (seleksi) dan placement (penempatan).

Dalam melaksanakan tiga kegiatan ini acuan yang digunakan dalam pendekatan yang Islami adalah jangan keluar dari empat pijakan dasar yaitu sebagai berikut:

1. Kesadaran bahwa kita adalah abdi Allah SWT dan sekaligus khalifahnya
2. Konsep Adil
3. Tujuan individu dan organisasi

2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan lima penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Penerapan Merit System dalam manajemen pemerintahan di kantor Camat Dayun

1. Ellyta Yullyanti (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi Kinerja Pegawai”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Seleksi secara signifikan dipengaruhi oleh rekrutmen dan sehingga kinerja dipengaruhi secara signifikan oleh seleksi. Namun, rekrutmen secara tidak langsung mempengaruhi kinerja melalui proses pemilihan
2. Friska Amelia (2012) Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Etos Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan Provinsi Riau”. Hasil penelitian menunjukkan keseluruhannya termasuk dalam kategori Cukup Baik, dimana indikator tersebut meliputi Motivasi, Penilaian Prestasi Kerja, Peraturan Organisasi, Pengaruh Antar Sesama Rekan Kerja, Pengawasan dan Pembinaan Yang terlihat dari hasil rata-rata cukup baik, Ini disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Riau belum bisa sepenuhnya diterapkan dengan baik, karena kurangnya kesadaran pegawai dengan apa yang telah mereka lakukan hanya demi materil dan kedudukan semata bukan untuk melayani masyarakat dan mengabdikan dengan Negara.

3. Inggrila (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Sistem Penetapan Pegawai Di Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan”. Hasil penelitian Berdasarkan dari analisis data penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum sistem penempatan pegawai pada kantor camat lengayang berdasarkan teori Slamet Saksono yaitu merit sistem, sistem kawan dan sistem karir. Dari ketiga sistem penempatan pegawai yang dikemukakan oleh ahli maka kantor camat lengayang mayoritas memakai patronage sistem yaitu dengan adanya empat orang pejabat eselon yang ditempatkan berdasarkan sistem kawan. Kendala dalam penempatan pegawai pada kantor camat lengayang kabupaten pesisir selatan adalah belum terlaksananya merit system dalam penempatan pegawai, kurangnya kepercayaan pimpinan kepada pegawai, pimpinan tidak bisa menolak pegawai yang sudah ditempatkan oleh bupati karena

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

camat adalah bawahan bupati, kurangnya koordinasi dari pimpinan untuk pengusulan pegawai dan tidak adanya rotasi dan promosi.

4. Yola Elfira (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penempatan Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau”. Hasil penelitian Penempatan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Pada Jabatan Administrasi yang sementara kosong digantikan oleh pelaksana tugas (plt) sampai adanya pelantikan baru oleh Gubernur, pegawai yang menjabat jabatan administrasi telah mengacu kepada identitas jabatan, kompetensi jabatan, dan persyaratan jabatan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang telah ditetapkan oleh dinas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.38 tahun 2017 ,namun untuk menunjang kompetensi jabatan ,pelatihan bagi setiap penjabat akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini sesuai Inventarisasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (Pelatihan) PNS tahun 2020.
5. Doni Anggara (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mengawasi Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”. Hasil penelitian Tinjauan yuridis terhadap fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam mengawasi perilaku Pegawai ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yakni melakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan terhadap pemberlakuan kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. KASN menerima laporan dari pimpinan lembaga/unit, ASN atau masyarakat tentang adanya pelanggaran kode etik atau kode perilaku yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, maka KASN memanggil ASN yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan atau di BAP, untuk mendapatkan klarifikasi dari yang bersangkutan atas pelanggaran yang telah dilakukannya.

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai tema yang diteliti. Meskipun karakteristiknya hampir sama namun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berbeda mengingat subjek, objek dan tempat penelitian serta fokus penelitian yang berbeda sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penerapan Merit Sistem di Kantor Camat dayun Kabupaten Siak

2.8 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu social (Singarimbun 2006:33)

Adapun batasan defenisi konsep tersebut adalah :

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
3. Manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan “tata kelola” atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.9 Konsep Operasional

Adapun konsep operasional dalam penelitian ini mengenai penerapan sistem merit dalam manajemen pemerintahan di kantor Camat Dayun Kab.Siak menggunakan beberapa indikator sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub-indikator
UU No.5 tahun 2014 tentang Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit (Merit System)	Proses seleksi	<ul style="list-style-type: none"> - Prosesnya adil dan terbuka - Kompetensi dan kualifikasi
	Penghargaan dan sanksi berbasis kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan penilaian kinerja yang objektif dan transparan
	Peningkatan dan evaluasi kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan dan diklat
	Manajemen Karir	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan - Pengembangan - Pola karir
	Promosi dan mutasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian kinerja yang objektif dan transparan - Kesesuaian kualifikasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

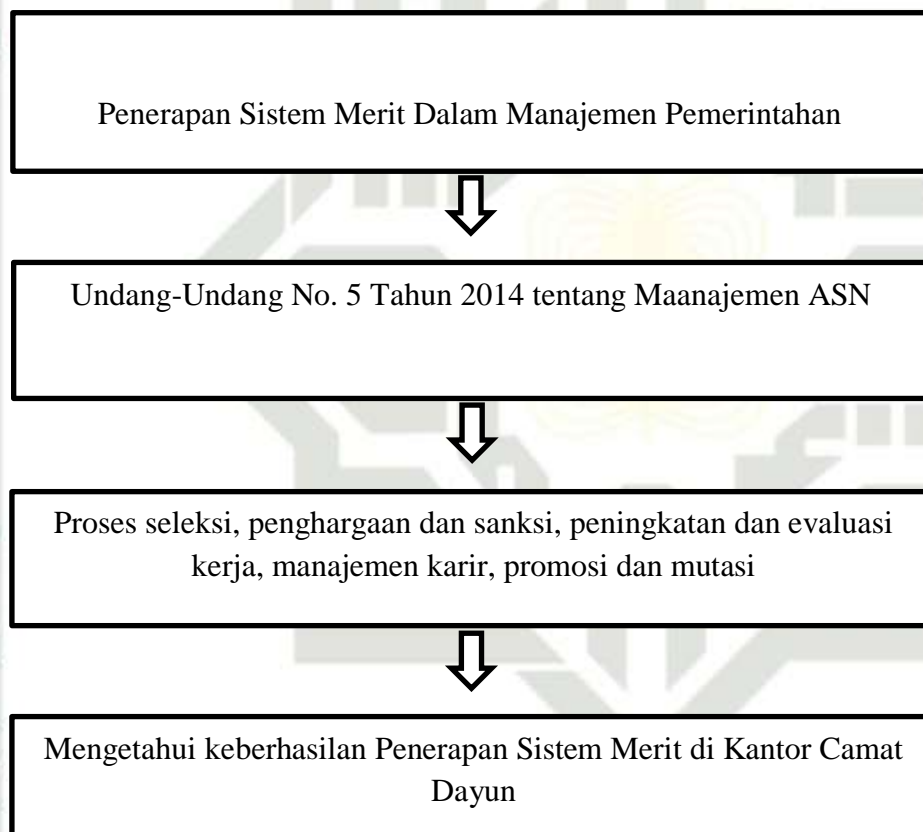
2.10

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur penelitian dalam memberikan penjelasan kepada orang lain. Dan untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk gambar dibawah ini :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan proposal ini penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Waktu penelitian penulis pada bulan Desember 2020 sampai selesai.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dalam penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kalitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada suatu objek penelitian.

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer yang berupa opini subjek (orang) secara individual ataupun kelompok. Hasil dari observasi terhadap suatu benda (fisik), kegiatan atau kejadian dan hasil pengujian

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh studi pustaka seperti dari perpustakaan, laporan-laporan atau dokumen peneliti yang terdahulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta data online seperti dengan mengakses internet untuk mencari sumber data yang berhubungan dengan penelitian

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknis pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan langsung kepada seseorang informan atau narasumber atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. Wawancara tersebut penulis lakukan di kantor Camat Dayun Kabupaten Siak.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman pada penelitian perlu mengunjungi lokasi penelitian yaitu di kantor Camat Dayun untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi dan kembali kepada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang berasal dari kata document yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan penelitian penulis juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan yang ada di kantor Camat Dayun terkait masalah yang ada di dalam penelitian tersebut

3.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber atau tempat untuk memperoleh informasi terkait penelitian. Menurut (Buchari, 2015) istilah subjek penelitian merujuk pada orang, individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (kasus) yang diteliti.

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi subjek dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu bukan sekedar mengetahui, tetapi juga menghayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil 'kemasannya' sendiri.
4. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong 'cukup asing' dengan peneliti, sehingga akan lebih memacu semangat untuk dijadikan narasumber.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis individu dan organisasi sebagai satuan yang diperhitungkan dalam subjek



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© HAK CIPTA MILIK UIN SUSKA R

penelitian. Dalam penelitian ini penulis menentukan beberapa pegawai Kantor Camat Dayun sebagai subjek penelitian. Penentuan subjek penelitian tersebut adalah berdasarkan teknik purposive sampling. Menurut (Fian,2020) teknik purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random dimana pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang dirumuskan terlebih dahulu. Sampel di ambil bukan secara acak, namun ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan atau kriteria tertentu.

Tabel 3.1

Informan Penelitian Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak

No	Informan Penelitian	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Novendra Kasmara, S.STP,M.Si	Camat Dayun	1 Orang
2.	Asmudin, S.Pd, SD	Kasi Pem dan Pelayanan	1 Orang
3.	Sulastri, SP	Kasubag Kepegawaian	1 Orang
4.	Mai yuspa, S.Sos	Kasubag Umum	1 orang
5	Drs.Wardan Adam Khatib,M.Si	Kasi PMK	1 Orang
6.	Eko Sunarji	Staff	1 Orang
7.	Lina	Staff	1 Orang
8.	Irma Kamilan,SE	Staff	1 Orang
Jumlah Informan			8 Orang

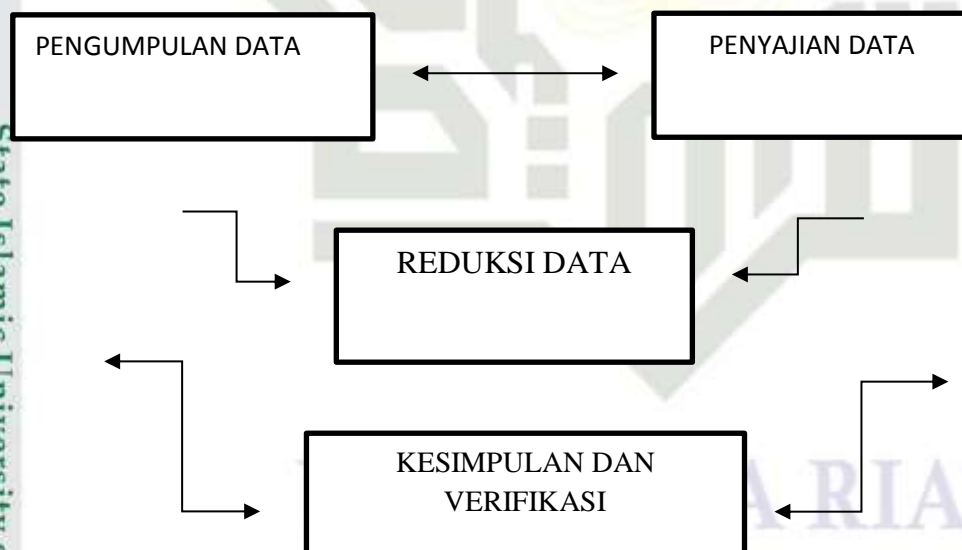
Sumber: Data olahan tahun 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2011) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi sebuah data yang dapat dikelola, mengsisstensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat untuk diceritakan kepada orang lain. Penelitian yang kaya data tidak berarti sama sekali jika data tersebut tidak dirangkai dalam struktur makna yang logis Agus Salim (dalam Sakir, 2015).

Gambar 3.1
Komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Agus Salim, (dalam sakir,2015)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses-proses analisa data kualitatif tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, yaitu pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Merit dalam manajemen pemerintahan, maka perlu dilakukan analisis yang mendalam terkait fenomena tersebut. Oleh karena itu perlu mengidentifikasi Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Pemerintahan di Kantor Camat Dayun
- b. Reduksi data (data reduction), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi. Artinya bahwa pada tahap ini akan memilih data yang diperoleh dari Kantor Camat Dayun
- c. Penyajian data (data display), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini dokumen yang sudah didapat dilapangan dan wawancara dengan Narasumber akan dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian terkait Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Pemerintahan di Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Sejarah Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak

Kecamatan Dayun merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Siak yang di mekarkan menjadi lima Kecamatan yaitu Kecamatan Dayun, Kecamatan Tualang, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan Sungai Mandau yang dilaksanakan pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001.

Adapun tujuan dari pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat dan Pemerintah dalam menjalankan roda Pemerintahan yang berhubungan dengan administrasi, serta mempermudah jangkauan pembangunan sehingga dengan demikian potensi yang ada di Kecamatan ini secara tidak langsung menjadi terangkat dengan jangkauan Pemerintah yang lebih dekat sebelum Otonomi Daerah ditetapkan.

Sudah dua puluh tahun Kecamatan Dayun berdiri, dimana terbentuknya Kecamatan Dayun sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Siak yang berperan menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat, ditingkat Kecamatan. Ibu kota Kecamatan Dayun terletak di Kampung Dayun karena dipandang sangat strategis untuk perluasan kawasan pembangunan perkantoran dan mudah di temui oleh pihak manapun yang ingin berkunjung dan mengurus administrasi.

Kecamatan Dayun seperti pada umumnya wilayah Kabupaten Siak terdiri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari dataran rendah, bergelombang, dan sedikit berbukit dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolid merah kuning dari batuan dan alluvial serta tanah orgonosol dan gleyhumus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Kecamatan Dayun secara umum berada pada daerah dataran dan sedikit berbukit, dengan mayoritas sektor pertanian yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit, daerah ini juga terkenal sebagai salah satu penghasil minyak bumi dengan lapangan minyak zamrudnya dan objek wisata Danau Zamrud Pulau Besar dan Kecil yang terletak di Kampung Dayun.

Kecamatan Dayun terletak antara : $0^{\circ} 33' - 0^{\circ} 44'$ LU dan $101^{\circ} 51' - 102^{\circ} 21'$ BT dengan luas wilayah $\pm 137.322.137$ Ha, adapun batas wilayah Kecamatan Dayun sebagai berikut:

1. UTARA : Kecamatan Mempura
2. SELATAN : Kabupaten Pelalawan
3. BARAT : Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Kerinci Kanan
4. TIMUR : Kecamatan Sungai Apit

4.2 Visi dan Misi Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak

Visi merupakan suatu yang di dambakan untuk dimiliki atau diperoleh dimasa yang akan datang (What Do They Want to Have) sedangkan Misi adalah apa yang di dambakan untuk menjadi yang di inginkan dimasa depan (That They Want to Be). Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu, suatu organisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulak perlu merumuskan Misi yang akan di emban arena misi itulah yang berperan sebagai pemandu tindakan eksekutif di masa depan.

Visi Kantor Camat Dayun :

“ Terwujudnya kecamatan Dayun sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat yang tertib, taat dan terpadu dalam mensukseskan program pemerintah kabupaten daerah Siak”

Misi Kantor Camat Dayun :

1. Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib, taat dan patuh terhadap peraturan pemerintah
4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas bagi aparatur kecamatan
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, mudah,murah,cepat dan transparan

4.3 Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

1. Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh bupati
2. Pelimpahan urusan otonomi daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atur dalam peraturan bupati



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat juga meneyelenggarakan tugas umum pemerintahan
4. Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing
5. Sekretaris Kecamatan adalah penyelenggara Administrasi Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat
6. Kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan
7. Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8. Setiap pimpinan organisasi kecamatan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
9. Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan

Uraian Tugas dan Wewenang Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

1. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum.
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.
5. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kampung dan kelurahan.
6. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris mempunyai tugas pokok membina dan melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian dilingkungan pemerintah kecamatan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, aset daerah dan kepegawaian.
2. penyelenggaraan urusan umum, urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Umum

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Umum adalah sebagai berikut :

1. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, aset daerah dan kepegawaian.
2. penyelenggaraan urusan umum, urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Adapun tugas pokok dari Kasubbag Keuangan dan Kepagawaian antara lain :

1. Menyusun rencana operasional program kerja Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
2. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
3. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan.
4. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi.
5. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum
8. Melaksanakan pembendaharaan keuangan.
9. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas.
10. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan Keputusan Bupati.
11. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi.
12. Mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatus Sipil Negara.
13. Menyelenggarakan bahan evaluasi kinerja pegawai.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

Dalam Melaksanakan tugas pemerintahan, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas membantu Camat dalam membina, mengkoordinasi dan melaksanakan tugas dibidang pemerintahan dan pelayanan. Rincian tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan antara lain sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan/ atau kelurahan dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan.
2. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan.
3. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan pelayanan.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan kampung/ kelurahan.
5. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan penghulu.
6. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian penghulu dan perangkat kampung lainnya.
7. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanian/ keagrariaan.
8. Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan perangkat daerah dan atau/ instansi terkait lainnya.
9. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Melakukan penyusunan standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan serta legalisasi administrasi pertanahan sesuai kewenangannya.
12. Melakukan penerimaan, pemrosesan, penerbitan dan pembatalan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya.
13. Melakukan pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang berasal dari perangkat daerah yang membidangi pembinaan pelayanan public.
14. Melaksanakan pelayanan umum ditingkat kecamatan dibidang perizinan, non perizinan dan administrative lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/ berkas, permohonan dan penerbitan surat penyampaian kembali dokumen/ berkas kepada pemohon.
15. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dari pelayanan umum yang menghasilkan pendapatan.
16. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
17. Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
18. Melakukan kerjasama dengan seksi pelayanan umum dan seksi-seksi lainnya dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pemberian rekomendasi dibidang perizinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kampung Dan Kelurahan

Tugas pokok dari Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kampung dan Kelurahan adalah membantu Camat dalam membina, mengkoordinasi dan melaksanakan tugas bidang pemberdayaan masyarakat kampung dan kelurahan. Adapun rincian dari tugas-tugas tersebut antara lain :

1. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat, kampung dan kelurahan.
2. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan.
3. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan dibidang perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kampung dan kelurahan.
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
5. Melaksanakan penyusunan profil kecamatan.
6. Melakukan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK) bersama-sama dengan seksi-seksi pada unit kerja maupun lembaga/ dinas/ instansi terkait.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Melaksanakan fasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan.
8. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
9. Melaksanakan pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan.
10. Melaksanakan pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah.
11. Membuat laporan pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rincian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

1. Membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan kesatuan bangsa, organisasi kemasyarakatan serta perlindungan masyarakat.
2. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menyelenggarakan pembinaan wawasan kebangsaan, perlindungan dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (POLRI dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
6. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kegiatan social politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
7. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan bencana tingkat kecamatan.
8. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban umum.
9. Membuat laporan pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang kesejahteraan social :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial
2. Melaksanakan pembinaan pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesenian rakyat
3. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga berencana
4. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga, perlindungan anak dan kehidupan beragama serta organisasi sosial kemasyarakatan lingkup tugasnya;
5. Melaksanakan pembinaan dibidang sosial yang meliputi pengentasan kemiskinan, bantuan sosial serta bantuan korban bencana;
6. Menyelenggarakan pembinaan peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
7. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan sosial
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sumber atau gambaran dari organisasi, baik tentang luasnya organisasi atau dengan kata lain struktur organisasi berdasarkan kedudukan atau jabatannya masing-masing yang disusun sedemikian rupa sehingga terlihat garis komando dari atasan ke bawahannya. Struktur organisasi merupakan salah satu kerangka yang merupakan hubungan antara kepala dengan sekretaris, dan kabid dengan kasi dan pejabat lainnya sehingga terbentuk jenis kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab dalam suatu organisasi tersebut. Adapun struktur organisasi Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak dilihat sebagai berikut :

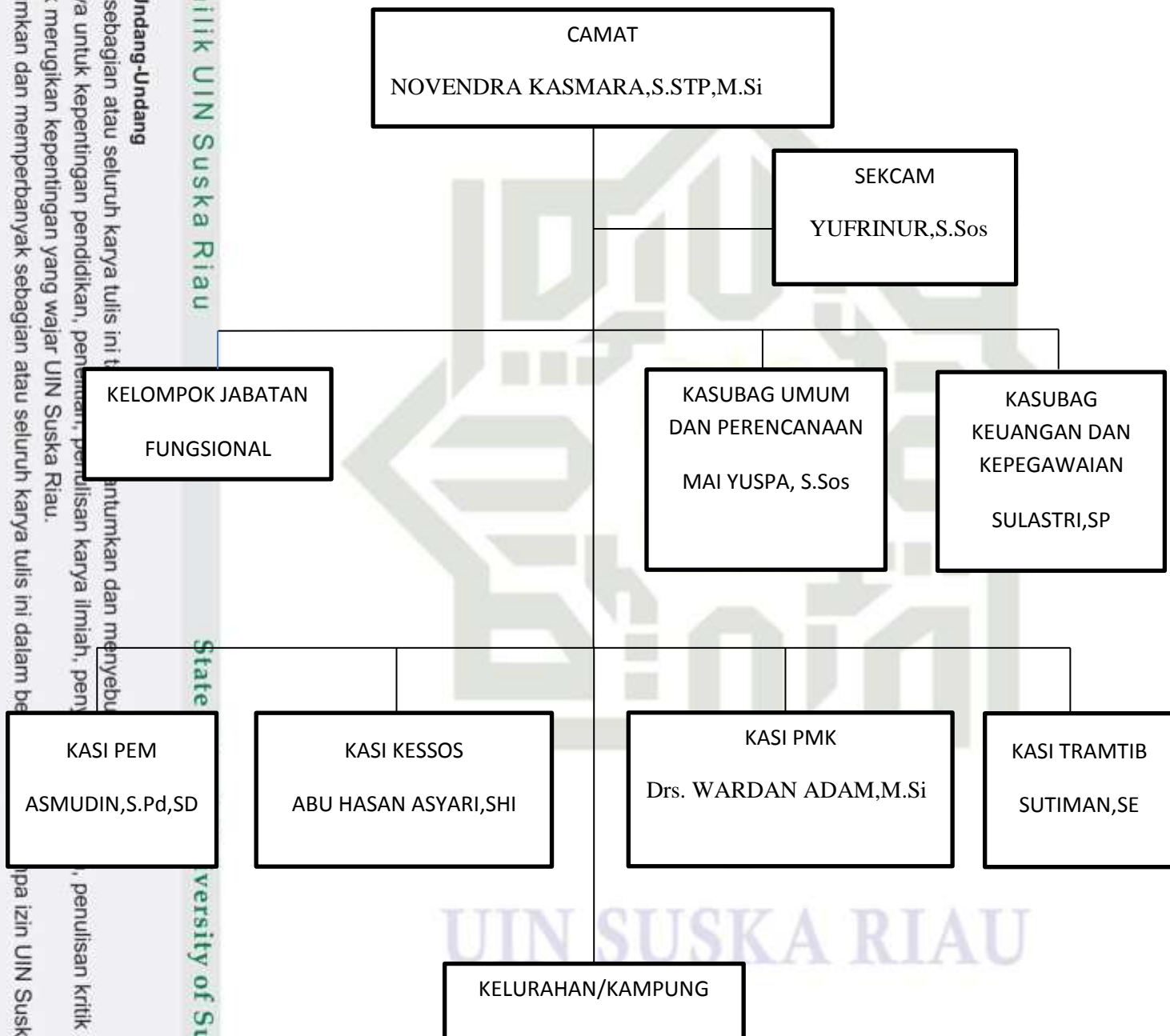
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, dan kegiatan lainnya yang bersifat non komersial.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak



(sumber: Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Merit System Dalam Manajemen Pemerintahan di Kantor Camat Dayun, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Merit Sistem berdasarkan indikator proses seleksi belum berjalan dengan baik. Hasil penelitian menyatakan proses seleksi sudah lama tidak dilakukan karena keterbatasan anggaran, dengan demikian penulis melihat perlunya proses seleksi secara terbuka dalam mendapatkan pegawai tidak tetap/honorer agar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.
2. Penerapan Merit Sistem berdasarkan indikator penghargaan dan sanksi berbasis kinerja sudah berjalan dengan baik karena dalam memberikan Penghargaan dan sanksi kepada ASN sudah dilakukan sesuai dengan prosedur maupun UU yang berlaku dan pemberian penghargaan dan sanksi nya sesuai dengan penilaian kinerja yang ada di dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
3. Penerapan Merit Sistem berdasarkan indikator Peningkatan Evaluasi kerja belum berjalan dengan baik. Untuk peningkatan evaluasi kerja perlu adanya pembinaan ataupun bimtek, akan tetapi di kantor camat tersebut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan hanya dilakukan untuk jabatan teknis saja dan untuk jabatan lain nya sudah lama tidak dilakukan karena keterbatasan anggaran.

4. Penerapan Merit Sistem berdasarkan indikator manajemen karir yaitu perencanaan, pengembangan dan pola karir belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Mengingat dalam hal pengembangan karir kurang nya pelatihan dan pengembangan untuk para pegawai sehingga mereka belum sepenuhnya mengetahui bagaimana program pengembangan karir tersebut. Tidak adanya pola pengembangan karir yang jelas menyebabkan pegawai tidak memiliki motivasi untuk berprestasi.
5. Penerapan Merit Sistem berdasarkan indikator Promosi dan Mutasi sudah berjalan cukup baik. hal ini terlihat dari lembaga yang memberikan kesempatan pegawai untuk meningkatkan kinerja sehingga pegawai dapat dengan mudah mendapatkan promosi. Selain itu, lembaga secara rutin mengadakan rotasi dan mutasi untuk menghindari kejenuhan pegawai serta bertujuan agar pegawai dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu organisasi.
6. Dalam Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Pemerintahan di Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala yang dihadapi diantaranya yaitu: Keterbatasan anggaran, Keterbatasan kemampuan pengelola pegawai, Keterbatasan sumber daya manusia, tingkat pendidikan dan pelatihan.



6.2 Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan, maka dalam uraian tersebut akan di kemukakan saran sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perlu diberikan pemahaman dan pembinaan kepada pegawai terkait sistem merit sehingga dapat menciptakan pegawai yang profesional dan berintegritas.
2. Membangun sistem pembinaan karier yang berkelanjutan, yang dimulai sejak mereka diterima menjadi pegawai sampai mereka mengakhiri masa jabatannya, agar dapat menjalankan tugasnya secara professional.
3. Perlu mengembangkan manajemen kinerja untuk memastikan masing-masing pegawai dapat mencapai target yang telah diturunkan dari visi, misi dan tujuan instansi.
4. Menyusun kebijakan penggajian, penghargaan yang dikaitkan dengan kinerja dan disiplin untuk menjadi reward and punishment yang efektif dalam mendorong kinerja serta membentuk budaya kerja yang lebih produktif.
5. Perlu dilakukan upaya yang lebih baik dalam mengatasi setiap kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem merit di Kantor Camat Dayun seperti dalam hal anggaran pemerintah harus mengoptimalkan dana yang dimiliki serta selalu berkoordinasi kepada pemerintah pusat agar dapat diberikan tambahan anggaran dalam pelaksanaan sistem merit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Arikunto, Suharsimi, *Pembinaan SDM berbasis kompetensi*, PT Pustaka Binama Presindo Jakarta, 2011.

Basri, Hasan. "*Analisis Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Merit Sistem (Studi penelitian Di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah)*". Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

Buchari, Zainun, *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia Cetakan Ketiga*. Jakarta: Toko Gunung Agung .

Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Qur'an.

Dunn, William N, *Analisis Kebijakan Publik*, Gajahmada University. Pres. 2000. Djemari Mandapi, *Assesment Dalam Pembelajaran*, Edisi Empat Gramedia Jakarta, 2008.

Fazli, Charizma Nugraha, "*Penerapan Sistem Merit Dalam Pengisian Perangkat Desa*". Skripsi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018

Hartini, Sri, Setiajeng, Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hartini, Sri, Setoajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/41818/25413>

<http://repository.ut.ac.id/2103/1/40641.pdf>

<http://paten.siakkab.go.id>

Istianto, Bambang. *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2011.

Komisi Aparatur Sipil Negara, *Pemetaan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)*, Jakarta, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laksmi, Ni Putu Yayi dan I Ketut Makeling, “*Penyelenggaraan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*”. Karya Ilmiah Program Kekhususan Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Udayanan, 2018.

Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Instansi Pemerintah*;

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang *Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, 2017

Peraturan menteri PANRB No.40 Tahun 2018 tentang *Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN*

Sedarmayanti, (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Bandung : PT Refika Aditama.

Komisi Aparatur Sipil Negara, *Pemetaan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)*, Jakarta, 2018.

Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014

Moekijat., *Administrasi Kepegawaian Negara Indonesia*. Bandung: Sumber Indah), 2009.

Ndraha, Taliziduhu. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*., Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Thoha, Miftah. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Naiinggolan, H, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, PT. Pertija Jakarta, 1987

Widodo, *Penerapan Merit System*, Jakarta ; Bumi Aksara, 2005

Wunggu, Jiwo. *Merit System*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada 2003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah di kantor camat dayun sudah menerapkan merit sistem ?
2. Dalam penerapannya bagaimana proses seleksi yang ada di kantor camat dayun?
3. Apa saja kriteria yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ?
4. Apakah proses seleksi dilakukan secara adil dan terbuka ? dalam artian tidak ada saling memihak satu sama lain?
5. Bagaimana cara mengukur kinerja pegawai ?
6. Penilaian kinerja pegawai dilakukan dalam jangka waktu berapa lama ?
7. Jika pegawai kinerjanya baik apakah mendapat penghargaan/reward ?
8. Apa kriteria nya untuk seorang pegawai mendapatkan penghargaan/reward ?
9. Apakah penghargaan dan sanksi yang diberikan berdasarkan penilaian kinerja dan sudah transparan ?
10. Kemudian apabila pegawai kinerjanya buruk/belum maksimal, apakah tindakan yang di ambil ? apakah mendapatkan sanksi ? contohnya seperti apa ?
11. Apakah kantor camat dayun sudah menerapkan kode etik dan kode perilaku ASN ?
12. Apakah kantor camat Dayun memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang ?
13. Dalam hal peningkatan dan evaluasi kerja, apakah dilaksanakan bimbingan dan diklat?
14. Apakah bimbingan dan diklat sudah terlaksana dengan baik ?
15. Jika dilakukan bimbingan, bimbingan yang seperti apa? Dan dalam jangka waktu berapa lama ?
16. Apakah semua pegawai wajib mengikuti bimbingan itu atau hanya kepala bagian nya saja ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

17. Setelah bimbingan dan diklat apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan pegawai dalam mengembangkan karir nya ?
18. Bagaimana proses pengembangan, perencanaan serta pola karir yang ada di kantor camat dayun ?
19. Apakah kantor camat dayun memberikan pelatihan yang dapat menunjang pengembangan karir pegawai ?
20. Apakah kantor camat dayun memberikan kesempatan yang sama untuk semua pegawai untuk mengembangkan karir ?
21. Apakah karir pegawai dapat meningkat jika pegawai itu sendiri meningkatkan pengetahuan nya ?
22. Bagaimana penyusunan pola karir yang ada di kantor camat dayun ? apakah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku ?
23. Bagaimana prosedur penilaian kinerja di Kantor Camat Dayun?
24. Jika kinerja pegawai semakin baik apakah dapat promosi jabatan ?
25. Apakah promosi dilakukan berdasarkan senioritas atau prestasi kerja ?
26. Kriteria sehingga pegawai mendapatkan promosi jabatan itu seperti apa ?
27. Promosi jabatan ini dilakukan dalam jangka waktu berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali ?
28. Jika kinerja pegawai semakin buruk apakah bisa dimutasi ke bagian yang lebih dia mampu ?
29. Kriteria apa saja sehingga pegawai bisa dimutasi ?
30. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan dayun dalam menerapkan sistem merit ? dan bagaimana upaya untuk mengatasinya ?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA



Narasumber 1 : Novendra Kasmara, S.STP,M.Si



Narasumber 2 : Asmudin, S.Pd, SD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narasumber 3 : Maiyuspa, S.Sos



Narasumber 4 : Sulastri, SP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narasumber 5 : Drs.Wardan Adam, M.Si



Narasumber 6 : Eko Sunarji

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narasumber 7 : Irma Kamilan, SE



Narasumber 8 : Lina



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H. B. Soeharto No. 155 Km. 12, Tahmadani Tanjung - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: fakomess@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.1/PP.00.9/1347/2021
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : **Bimbingan Skripsi**
Pekanbaru, 22 Februari 2021 M
10 Rajab 1442 H

Kepada
Yth. **Afrizal, S. Sos, M.Si.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : Imelda Maisyarah
NIM : 11770523554
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: **"Penerapan Merit System dalam Manajemen Pemerintahan di Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak"**. Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bld. Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 138 Km. 13 Taduhalang Tampus - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail : fakultas@uin-suska.ac.id

Nomor : Sifat : Lampiran : Hal :	: Uir.04/F.VII/PP.00.9/1248/2021 : Biasa : : Izin Riset	Pekanbaru, 17 Februari 2021 M 5 Rajab 1442 H
---	---	---

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NIM : Jurusan : Semester :	: Imelda Maisyuroh : 11770523554 : Administrasi Negara : VIII (Delapan)
--	--

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul
**"Penerapan Merit System dalam Manajemen Pemerintahan di Kantor
 Camat Dayun Kabupaten Siak"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara
 berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.


 Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001011 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 44/DPMPTSP/SKP/IV/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca surat permohonan Riset/Pra Riset dan Kepala DPMPTSP Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38939 Tanggal Riset 22 Februari 2021, dengan ini menerbitkan Surat Keterangan Penelitian kepada:

Nama	IMELDA MAISYAROH
NIM/NIK KTP	1408064905980001
Program Studi	Administrasi Negara
Jenjang	S1
Alamat	Jl. KH. A. Dahlan RT. 003 RW. 002 Kampung Sielang Sakti Kecamatan Dayun
Judul Penelitian	Penerapan Merit System dalam Manajemen Pemerintah di Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak
Lokasi Penelitian	Kantor Camat Dayun Kabupaten Siak

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 09 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK


H. HERIYANTO, SH
Pambina Utama Muda
NIP. 19710715 199803 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan).
2. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Yang Bersangkutan.

Dokumen ini menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

 Balai Sertifikasi Elektronik

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN DAYUN
 JL. RAYA ZAMRUD - PERAWANG KM. 70
 DAYUN

KODE PG 28866

Nomor : 071/SET/2021/02 Lampiran : - Perihal : Rekomendasi Riset	Kepada Yth : DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU di- TEMPAT
--	--

Berdasarkan Surat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Nomor: 44/DPMP/TSP/SKP/IV/2021, perihal tersebut pada pokok surat diatas, maka kami memberikan Rekomendasi Riset/Pra Riset kepada Saudara:

NAMA : IMELDA MAISYAROH NIM : 11770523154 Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA Jenjang : SI Judul Penelitian : "PENERAPAN MERIT SYSTEM DALAM MANAJEMEN PEMERINTAH DI KANTOR CAMAT DAYUN KAB.SIAK"	
--	--

Tempat Penelitian : KANTOR CAMAT DAYUN KAB.SIAK

Dengan Kesetiaan sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan Kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data ini;
- b. Pelaksanaan kegiatan Kegiatan Riset/ Penelitian ini berlangsung selama 3 (tiga) Bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi Siak dan instansi yang bersangkutan;
- c. Menyediakan 1 (satu) eksemplar hasil Riset yang telah dilaksanakan kepada Camat Dayun c.q. Kasi Kesejahteraan Sosial.

Derikikan Rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran Riset ini, terima kasih.

DIKELUARKAN : DAYUN
 PADA TANGGAL : 08 Juni 2021



CAMAT DAYUN,
NOVENDRA KASMARA, S.STP, M.Si
 NIP. 19801119 200112 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Imelda Maisyaroh, lahir di Siak pada tanggal 9 Mei 1999. Anak Pertama dari dua bersaudara, pasangan dari Bapak Ponadi dan Ibu Rindayati. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Palma Siwi pada tahun 2005, melanjutkan sekolah di SD Negeri 017 Sialang Sakti dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Bustanul Ulum Sialang Sakti dan selesai pada tahun 2014, lalu melanjutkan kembali pendidikan di SMA Negeri 1 Dayun dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan keperguruan tinggi negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program studi Ilmu Administrasi Negara dan menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2021.

Pada masa perkuliahan penulis telah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kecamatan Dayun dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Email : imeldamaisyaroh99@gmail.com